

**“KEBIJAKAN KRATON YOGYAKARTA
MENGHADAPI JEPANG TAHUN 1940-1945”**

JURNAL



Oleh :

ARDIKA KURNIANDARU

13406241029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

KEBIJAKAN KRATON YOGYAKARTA MENGHADAPI JEPANG TAHUN 1940-1945

Oleh:

**Penulis 1 : Ardika Kurniandaru
Penulis 2: Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd**

ABSTRAK

Kraton Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mempunyai keinginan yang kuat untuk lepas dari penjajahan dan pengaruh Jepang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Kondisi Yogyakarta tahun 1940-1945; (2) Kraton Yogyakarta menghadapi Jepang tahun 1940-1942; (3) Implementasi kebijakan Kraton Yogyakarta tahun 1943-1945.

Tahapan penelitian ini menggunakan metode menurut Kuntowijoyo, yang terdiri atas 5 tahap, (1) pemilihan topik, yang berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, (2) heuristik, yaitu dengan mengumpulkan sumber. Sumber primer peneliti menggunakan beberapa arsip yang berada di Perpustakaan Widyo Budoyo Kraton Yogyakarta, (3) kritik sumber, peneliti melakukan kritik ekstren dan intern, (4) interpretasi, peneliti menafsirkan fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan yang utuh, (5) historiografi, peneliti melakukan penulisan sejarah.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa: (1) Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan yang berada di bawah pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang terikat dengan kontrak politik, kebijakan yang diambil oleh Kraton Yogyakarta harus sejalan dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda; (2) Kraton Yogyakarta mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi datangnya tentara Jepang yang mulai mengawatirkan dengan melakukan serangan ke wilayah Hindia Belanda, kebijakan juga diambil bila Yogyakarta diduduki. Berbagai upaya dan usaha juga dilakukan oleh Kraton Yogyakarta untuk membantu kebutuhan perang pemerintah Kolonial Hindia Belanda serta meyakinkan rakyat akan keadaan yang akan terjadi; (3) Tentara Jepang yang memasuki Yogyakarta tidak serta merta dilawan oleh Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan perlawanan dengan strategi yang cerdas. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menghindari propaganda Jepang serta menyelamatkan rakyat dari kekejaman tentara Jepang yang mencoba menguras tenaga rakyat dan sumber daya alam.

Kata Kunci: Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jepang, 1940-1945.

THE POLICIES OF KRATON YOGYAKARTA AGAINST JAPAN IN 1940-1945

Author 1: Ardika Kurniandaru

Author 2: Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd

ABSTRACT

Kraton Yogyakarta under Sri Sultan Hamengkubuwono IX had a strong desire to escape from the occupation and influence of Japan. This study aimed to describe: (1) the conditions of Yogyakarta in 1940-1945; (2) Kraton Yogyakarta in facing Japan in 1940-1942; and (3) the implementation of the policies of Kraton Yogyakarta in 1943-1945.

The study used Kuntowijoyo's method consisting of 5 stages, namely: (1) topic selection based on emotional and intellectual closeness; (2) heuristics, i.e. source collection; for primary sources the researcher used several archives in the Widyo Budoyo Library of Kraton Yogyakarta; (3) source criticism in which the researcher conducted external and internal criticism; (4) interpretation in which the researcher interpreted historical facts into a unified whole; and (5) historiography in which the researcher did the history writing.

The results of the study and analysis were as follows. (1) Yogyakarta was a kingdom under the Dutch East Indies colonial government which was bound by a political contract; the policies adopted by Kraton Yogyakarta had to be in line with the Dutch East Indies colonial government. (2) Kraton Yogyakarta issued a variety of policies to anticipate the arrival of Japanese troops which began to be worrying by making an attack on the Dutch East Indies areas. Policies were also made when Yogyakarta was occupied. Various efforts and attempts were also made by Kraton Yogyakarta to fulfill the needs of the war of the Dutch East Indies colonial government and to convince the people of the conditions that would happen. (3) The Japanese troops entering Yogyakarta were not immediately opposed by Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta under Sri Sultan Hamengkubuwono IX made an opposition with an ingenious strategy. Policies were made to avoid Japanese propagandas and to save the people from the atrocities of Japanese soldiers who tried to exhaust people's energy and natural resources.

Keywords: *Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Japan, 1940-1945*

PENDAHULUAN

Kraton Yogyakarta berdasarkan perjanjian Ganti merupakan sekutu Belanda yang prinsipnya harus selalu membantu kegiatan pemerintah kolonial di daerah Jawa. Peraturan selanjutnya ditegaskan pula pada Politik kontrak yang terakhir yakni tahun 1941 No. 47, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa daerah kesultanan Yogyakarta merupakan bagian Hindia Belanda, sedang Hindia Belanda menurut asal 1 *Grondwet* Belanda merupakan bagian daripada kerajaan Belanda, sehingga dengan demikian Sultan mengakui berada dibawah kekuasaan ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal.¹

Pada tahun 1940, tanda-tanda Jepang akan menuju daerah selatan untuk mendapatkan minyak, timah dan karet Malaysia serta Hindia Belanda sudah mulai nampak. Jepang menyerang Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 dan menyatakan perang kepada Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda berpihak pada Amerika dan menganggap diri juga dalam keadaan perang Kekaisaran Jepang.² Sebagai wilayah dibawah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Kraton Yogyakarta juga dituntut untuk memberikan bantuan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Perjuangan Kraton Yogyakarta pada akhirnya harus berhadapan langsung dengan Pemerintah Militer Jepang, setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Kraton Yogyakarta dibawah Sri Sultan HB IX selalu berusaha memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah Militer Jepang untuk melawan dan menyelamatkan rakyat, serta mengadakan perubahan pemerintahan yang sedapat mungkin lepas dari kontrol Jepang.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian berjudul “Kebijakan Kraton Yogyakarta Menghadapi Jepang Tahun 1940-1945” berangkat dari rumusan masalah yang disusun peneliti. Buku Selo Sumardjan yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta* yang terbit pada tahun 1981 oleh Gajah Mada University Press. Selain itu digunakan juga buku karya Ryadi Gunawan dan Darto Harmoko yang berjudul *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Mobilitas Sosial di Yogyakarta Periode Awal Abad 20-an* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tahun 1993.

¹ Suwarno. *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius. 1994, hlm. 90.

² J.C. Bijkerk. *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter runtuhnya Hindia Belanda)*. Jakarta: Djambatan. 1988, hlm. 149.

Pergerakan dan gerakan pasukan Jepang ke Hindia Belanda dan Yogyakarta kemudian dibahas dengan buku karya Ken'Ichi Goto yang berjudul *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* yang terbit pada tahun 1998 di Jakarta oleh Penerbit Obor Indonesia. Permasalahan yang muncul di Jepang akibat industri yang besar adalah kekurangan sumber daya terutama minyak.

Masuknya Jepang di wilayah Yogyakarta dan usaha-usaha Sri Sultan HB IX dibahas dalam buku *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX* karya Atmakusumah yang diterbitkan Gramedia di Yogyakarta tahun 1982. Pemikiran Sultan HB IX untuk lepas dari kontrol Jepang dibahas dalam buku karya P.J Suwarno dengan judul *Hamengkubuwono IX an Sistem Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis* yang diterbitkan Kanisius tahun 1999 di Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Menurut Kuntowijoyo, penelitian mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (Kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (historiografi).³

Pengumpulan sumber atau heuristik dibagi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari arsip yang tersimpan di Museum Widy Budoyo Kraton Yogyakarta mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh krton. Sumber sekunder berasal dari berbagai macam literatur baik buku, majalah maupun karya ilmiah.

Verifikasi atau kritik sumber dilakukan setelah sumber-sumber yang diperlukan terkumpul. Kritik diperlukan untuk validitas atau keabsahan dari sumber yang diperoleh, sehingga hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Tahapan ini ada dua, yaitu kritik ekstern yang bertujuan untuk menentukan autentitas sumber, baik keaslian sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta pengarang ; dan kritik intern yang bertujuan untuk menentukan kredibilitas sumber, baik isi, sumber, atau dokumen, meliputi bahasa dan situasi pengarang, gaya dan ide.

Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh setelah dilakukan kritik sehingga dapat memberikan kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau, yang dalam hal ini tentang Kebijakan Kraton Yogyakarta Menghadapi Jepang Tahun 1940-1945. Setelahnya, barulah hasil penelitian disajikan secara utuh dalam bentuk karya ilmiah sejarah atau historiografi.

PEMBAHASAN

1. Kondisi Yogyakarta tahun 1940-1945

a. Wilayah Yogyakarta

Wilayah Yogyakarta terletak di Jawa Tengah bagian selatan, wilayahnya meliputi sekitar 3.100 km². Daerah Yogyakarta berbatasan

³ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013, hlm.69.

dengan Karesidenan Kedu di bagian barat dan sebagian di bagian utara. Karesidenan Surakarta terletak di timur-laut dan timur dari wilayah itu. Batas di ujung paling utara adalah kawah Gunung Merapi.⁴

Yogyakarta sendiri merupakan wilayah kerajaan pecahan dari Kerajaan Mataram. Berdiri tahun 1755 dengan nama resmi Ngayogyakarta Hadiningrat. Didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwono I membangun Yogyakarta setelah menandatangani Perjanjian Giyanti.⁵ Wilayah inti kota Yogyakarta adalah istana yang dikelilingi benteng berparit. Daerah ini biasanya disebut sebagai *Jeron Benteng* yang terbagi atas daerah-daerah seperti Alun-alun Utara, *Teratag Pagelaran*, *Sitinggil Kemandungan*, *Kedaton*, *Magangan*, *Kemandungn Kidul*, *Sitinggil Kidul* dan Alun-alun Kidul.

Wilayah Yogyakarta awalnya meliputi wilayah yang sangat luas, mencakup separuh wilayah Mataram. Wilayah Yogyakarta dibagi atas beberapa bagian, antara lain Kraton, Nagara, Nagaragung, Mancanegara.⁶

Wilayah Yogyakarta pada akhirnya terus berkurang karena akibat dari kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda, terakhir adalah setelah erang Dponegoro berakhir. Dengan adanya Perjanjian Klaten seluruh wilayah mancanegara Yogyakarta diambil alih oleh pemerintah Belanda, hingga menyisakan wilayah seperti sekarang ini.⁷

b. Penduduk Yogyakarta

Penduduk Yogyakarta adalah etnis Jawa, yang awalnya adalah pengikut Ki Ageng Pemanahan. Masyarakat Jawa dalam kehidupannya dibedakan menjadi empat tingkatan dalam struktur masyarakatnya. Pertama adalah para raja, kedua para kepala provinsi (kira-kira sama dengan bupati sekarang ini), ketiga kepala desa, dan keempat orang banyak yang terdiri dari penduduk desa.⁸ Sedangkan di wilayah *swapraja* Yogyakarta terdapat tiga struktur masyarakat, yaitu: *sentana dalem* atau kerabat raja (bangsawan), *abdi dalem* (para pegawai kerajaan atau birokrat), dan yang terakhir adalah *kawulo dalem* (rakyat kebanyakan).⁹

⁴ Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu. 2009, hlm. 3-4.

⁵ Hermanu. *Ngayogyakarta*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta. 2012, hlm. 56.

⁶ Selo Soemardjan *op.cit*, hlm. 27

⁷ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Kasultanan Yogyakarta Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985, hlm. 60.

⁸ D. H. Burger. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bharata. 1977, hlm. 20.

Masyarakat Yogyakarta bermukim di dalam benteng katon dan luar benteng. Pemukiman yang berada di dalam benteng tersebut dihuni oleh golongan bangsawan dan para *abdi dalem*. Pemukiman tersebut membentuk semacam perkampungan-perkampungan, yang tanahnya dipinjamkan untuk para *abdi dalem* tersebut yang kesehariannya bekerja di dalam istana. Perkampungan-perkampungan tersebut dinamakan sesuai dengan pekerjaan *abdi dalem* yang menempatinnya. Selain perkampungan yang berada di dalam benteng, juga terdapat perkampungan yang berada di luar tembok benteng. Di luar daerah benteng tersebut wilayahnya masih berupa tanah persawahan, ladang dan pemukiman rakyat jelata. Kampung-kampung yang tumbuh di luar benteng yang pada awalnya merupakan tempat pemukiman hamba istana dan tidak melayani rumah tangga istana sehari-hari, merupakan kelompok seprofesi dalam bidang pemerintahan, militer, pertukangan, perajin, serta golongan bangsawan yang memimpinnnya.

c. Birokrasi Pemerintahan Kraton Yogyakarta

Pemerintahan Yogyakarta sudah ada sejak Kraton Yogyakarta berdiri tahun 1756, sebagai kepala pemerintahannya adalah Raja. sebutan untuk Raja atau Ratu adalah *Sultan*. Kata Sultan diambil dari bahasa Arab Sulthoni, yang artinya yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan/ pemerintahan.

Terdapat pemisahan antara birokrasi *kraton* dan birokrasi *nagari* dibawah koordinasi *pepatih dalem*. Pemisahan urusan antara *kraton* dengan *nagari* telah membuat kekuasaan Sultan hanya pada birokrasi *kraton* saja. Susunan birokrasi dan yang menjalankan administrasi *kraton* dibagi dalam sembilan belas *kawedanan*. Masing-masing dikepalai oleh seorang pangeran dan seorang *bupati nayaka* sebagai wakilnya, kecuali bagian *kanayakan* yang dikepalai oleh *pepatih dalem* yang diangkat dari *abdi dalem*.¹⁰

Birokrasi *Nagari* yang dikoordinir oleh *pepatih dalem*. *Pepatih dalem* yang bertanggung jawab kepada Sultan juga kepada pemerintah Hindia Belanda bertugas sebagai kepala bagian *kanayakan* yang berpusat di Kepatihan. Dalam berhubungan dengan Sultan, *pepatih dalem* harus terlebih dahulu melalui *parentah luhur* yang mengurus urusan resmi. Hal yang menarik adalah selain membawahi birokrasi di *nagari*, *pepatih dalem* juga mempunyai bawahan didalam birokrasi *kraton*. Bagian *kanayakan* berada dibawah koordinasi *pepatih dalem* yang bertanggung jawab kepada Sultan. Walaupun pada prakteknya Sultan tidak banyak berperan dalam pemerintahan *nagari* akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan Belanda.

⁹ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa tahun 1942-1945*. Jakarta: Grasindo. 1993, hlm. 105

¹⁰ Poeroebaja. "Tatana Enggal", *Hoedyana Wara*, 22 Mei 1941, hlm. 31. dalam P.J. Suwarno., *op.cit*, hlm.68.

2. Kraton Yogyakarta Menghadapi Jepang Tahun 1940-1942.

a. Akhir Pemerintahan Kolonial Belanda di Yogyakarta

Wilayah Yogyakarta pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda merupakan mempunyai pemerintahan sendiri, dikenal dengan sebutan *Vorstenlanden*.¹¹ Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta itu dahulu disebut *Zelbestuur*, yaitu pemerintahan yang diatur sendiri yang mempunyai adat peraturan sendiri, dan tidak harus menurut peraturan-peraturan penjajah Belanda yang berpusat di Jakarta. Meskipun begitu pemerintahan Kasultanan Yogyakarta tersebut juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah Belanda.¹²

Status Yogyakarta sebagai wilayah Kasultanan ditentukan oleh kedua belah pihak bersama-sama ialah Gubernur Jenderal Belanda disatu pihak dan Sri Sultan dilain pihak. *Politiek contract* yang terahir adalah antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 18 Maret 1940 (stb tahun 1941 No. 47).¹³ Perjanjian *Politiek contract* menegaskan bahwa Kasultanan Yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan Hindia Belanda dan juga Kerajaan Belanda. Apapun keputusan yang diambil harus sepengetahuan dan persetujuan dari Gubernur Jenderal. Begitu pun bila ada keputusan dari Hindia Belanda atau Kerajaan Belanda maka Kasultanan ikut serta menjalankan peraturan tersebut.

Wilayah *Vosrtenlanden* seperti Kasultanan Yogyakarta, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan wakilnya yaitu seorang Gubernur. Gubernur bisa dikatakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta sejak berdirinya selalu didampingi oleh kekuasaan pemerintah Belanda, dengan mengangkat wakil-wakilnya yang semula berkedudukan di Magelang, dan pindah berkedudukan di Yogyakarta sesudah Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Kemudian wakil-wakil tersebut diberi pangkat Residen, dan sejak tahun 1927 diberi pangkat Gubernur.¹⁴ Residen pertama adalah C. Donkel yang mulai bertugas pada tahun 1755 hingga 1761.¹⁵

¹¹ Ir. Soejamto. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT.BINA AKSARA. 1988, hlm. 162.

¹² Soedomo Bandjaransari. *Sedjarah Pemerintahan Kota Jogjakarta*. Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kota Pradja Jogjakarta. 1952, hlm. 8.

¹³ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1984, hlm. 4.

¹⁴ Soedomo Bandjaransari. *op.cit*, hlm. 7.

¹⁵ Soekanto. *Sekibar Jogjakarta 1755-1825*. Djakarta: Mahabarata. 1952, hlm. 8.

Kontrol Pemerintah Belanda terhadap Kasultanan Yogyakarta, tidak hanya sekedar penempatan seorang Gubernur Belanda di pusat pemerintahan Kasultanan saja, melainkan juga menempatkan orang-orangnya sampai di kabupaten-kabupaten. Tiap-tiap kabupaten oleh Pemerintah Belanda ditempatkan seorang Controleur Belanda, yang berada diatas bupati. Controleur Belanda ini tidak bertanggung jawab kepada Sultan atau *Pepatih Dalem*, melainkan bertanggung jawab langsung pada Gubernur Belanda, dan selanjutnya Gubernur Belanda di Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal yang atas nama Ratu Belanda yang memerintah Hindia Belanda. Dengan demikian maka bupati sebenarnya mempunyai dua majikan, di samping bertanggung jawab kepada *Pepatih Dalem*, bupati juga harus bertanggung jawab kepada Controleur Belanda. Nama Controleur Belanda itu kemudian diganti namanya menjadi Asisten Residen, seperti halnya Gubernur Belanda di Yogyakarta itu dahulu bernama Residen.¹⁶

b. Awal Masuknya Pemerintahan Militer Jepang di Yogyakarta

1) Latar Belakang Ekspansi Jepang ke Daerah Selatan

Kekaisaran Jepang mengalami perubahan yang sangat maju pasca restorasi Meiji. Pasca restorasi, Jepang seolah menjadi sebuah negara yang memiliki sesuatu kekuatan yang nihil menjadi kekuatan yang luar biasa di Asia, yang kemudian memunculkan jargon Asia Timur Raya.

Perombakan-perombakan inilah yang kemudian membuat Jepang menjadi negara yang cukup maju. Jepang berubah dari negara yang tertutup menjadi negara yang berbasis industri. Sebagai negara yang relatif sempit, Jepang memerlukan daerah yang lebih luas untuk memasarkan dagangan hasil industri yang sedang dikembangkan di zaman modernisasi itu. Selain menghadapi permasalahan tersebut, Jepang juga menghadapi permasalahan dengan pertumbuhan penduduknya yang makin pesat. Jepang mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan mencoba melebarkan sayapnya ke daerah lain di sekitarnya.

Berbagai gerakan dan kemajuan Jepang di wilayah kawasan membuat Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mempunyai wilayah jajahan di Asia menjadi khawatir. Hingga puncaknya Amerika Serikat yang diikuti oleh Inggris dan Belanda melakukan embargo terhadap Jepang.

2) Hubungan Jepang dengan Wilayah Hindia Belanda

Mengenai rencana Jepang yang akan maju ke Selatan (khususnya Hindia Belanda), rencana-rencananya sudah lebih dahulu disiapkan di Tokyo. Bahan-bahan baku yang dihasilkan adalah sedemikian penting artinya bagi Jepang. Dimasa-masa yang sulit karena krisis, Jepang melakukan penetrasi dalam

¹⁶ Soedarisman Poerwokoesoemo (1984), *op.cit*, hlm. 160.

lapangan perdagangan di Hindia Belanda. barang-barang Jepang yang banyak dan harganya murah membanjiri pasaran di Hindia Belanda. Rakyat lambat laun menganggap bangsa Jepang sebagai bangsa yang tulus dan ikhlas membantu penderitaan mereka.

Akibat Perang Dunia I menyebabkan terputusnya jalur antara Eropa dengan Hindia-Belanda. Sejak peristiwa ini peran Eropa diambil alih oleh Jepang dan membuka jaringan dengan perdagangan barang-barang industri dalam berbagai jenis. Jaringan perdagangan antara Jepang dan Hindia Belanda terealisasi pertama kali dengan pengiriman delegasi yang terdiri dari 50 anggota yang merupakan anggota tertinggi dari parlemen.¹⁷ Sejak itulah kemudian perusahaan-perusahaan orang Jepang menjamur di wilayah Hindia Belanda.

Orang-orang Jepang banyak berdatangan ke Hindia Belanda untuk berbisnis, di Yogyakarta sendiri terdapat pengusaha bernama Sawabe Masao. Dirinya adalah pendiri Toko Fuji (Fuji Yoko) di Yogyakarta, dia masuk ke Hindia Belanda pada tahun ke-41 Meiji.¹⁸ Toko Fuji yang ia dirikan ini merupakan toko Jepang terbesar di Yogyakarta pada zaman toko Jepang. Toko ini terletak di Patjinan Straad dan sekarang telah berubah menjadi Ramai Mall di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Pada 13 September 1940 diadakan Perundingan Perdagangan Jepang-Belanda II antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Hindia-Belanda. Dalam perundingan perdagangan yang pertama yang diadakan enam tahun sebelumnya, pokok pembicaraannya ialah memperbaiki surplus besar Jepang, sedangkan kali ini pihak Jepang meminta penjualan sumber alam penting yang sangat diperlukan bagi kesinambungan hidup kepada pihak Hindia Belanda.¹⁹ Akhirnya perundingan berjalan tidak lancar. Perundingan yang semestinya hanya berupa perjanjian ekonomi, kenyataannya sangat mengandung unsur politik.

Pemerintah Jepang di dalam perundingan perdagangan ini terkesan seolah memaksakan kehendaknya, serta tuntutan yang terlalu besar kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai minyak. Hal inilah yang kemudian memicu kecurigaan Pemerintah Hindia-Belanda akan niat sebenarnya dari Jepang. Apalagi Jepang selalu mengadakan propaganda yang sifatnya bermusuhan, dengan menyatakan wilayah Hindia-Belanda adalah bagian dari persemakmuran Asia Timur Raya.

¹⁷ Meta Sekar Puji Astuti., *op.cit*, hlm. 48

¹⁸ Tahun 1909 Masehi, 1 Meiji berarti tahun 1868 dihitung dari awal bertahtanya Kaisar Meiji di Jepang

¹⁹ Ken'Ichi Goto., *op.cit*, hlm. 83.

3) Jepang Memulai Ekspansinya ke Selatan

Dimulai pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melaksanakan serangan udara kejutan terhadap Pearl Harbour, pangkalan Angkatan Laut AS terbesar di Pasifik.²⁰ Serangan ini mengakibatkan tewasnya ribuan tentara Amerika Serikat, tenggelamnya beberapa kapal dan rusak serta pesawat terbang, dan terbakarnya persediaan minyak. Praktis untuk sementara armada Amerika Serikat tidak bisa bergerak sama sekali alias lumpuh. Serangan Jepang selanjutnya ke daerah jajahan Barat di wilayah Selatan berjalan tanpa hambatan.

c. Kebijakan Kraton Yogyakarta Menghadapi Jepang

Penyerbuan ke daerah-daerah Selatan dilakukan sangat baik oleh Angkatan Darat (Rikugun) maupun Angkatan Laut (Kaigun) Jepang. Angkatan Darat bertugas merebut Malaya, Sumatrea, Luzon dan Burma. Sedangkan Angkatan Lautnya menyerbu Pearl Harbour, Mindanau, Kalimantan, Sulawesi, Irian dan pulau Pasifik. Kedua angkatan itu akan menyerbu Jawa, pusat kekuasaan dan militer Belanda.²¹ gerakan penyerbuan Jepang sangat cepat sekali, dan dalam waktu singkat dapat menguasai banyak wilayah.

Adanya bahaya yang sudah jelas mengancam ini, maka Pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jendral Tjarda van Starckenbordh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, tidak terkecuali Yogyakarta berusaha mempengaruhi Sultan dan penduduk pribumi agar membantu jika perang melanda Hindia Belanda. Bersama dengan Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborgh, Gubernur Yogyakarta L. Adam dan Ch. Van der Plas seorang anggota Raad van Indie merundingkan tindakan yang perlu dilakukan jika Pemerintah Militer Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda.

Yogyakarta semasa perang ini berada dibawah Komando Militer Teritorial ke-2 Jawa. Komando pasukan ini di Yogyakarta sendiri bertugas untuk menjaga tempat-tempat yang penting serta mengawasi para Bupati agar tidak mengubah status daerah tanpa seijin dari Komando Militer. Setelah menyatakan perang terhadap Jepang, kemudian orang-orang Jepang yang berada di Hindia Belanda ditangkap dan dianggap sebagai tawanan perang²². Hal ini karena kecurigaan pemerintah Hindia-Belanda terhadap orang-orang Jepang yang dianggap mata-mata. Pemerintah Militer di Yogyakarta kemudian menerbitkan Undang-undang no 102/Dv0/VIIIA-3.

²⁰ Himawan Soesanto, dkk., *op.cit*, hlm. 9.

²¹ G. Moedjanto. *op.cit*, hlm. 69.

²² Meta sekar Puji astuti.,*op.cit*, hlm. 125

Pada masa perang ini, Kraton Yogyakarta juga melakukan berbagai upaya bila sewaktu-waktu Jepang benar-benar menyerang. Ketika tanda-tanda perang akan berkecamuk Pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk memperkuat angkatan perangnya. Terdapat dua komite *Fonds* yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat di Hindia, yaitu *Koninging Wilhelmina Fonds* dan *Prins Berhard Fonds*. Lalu timbul juga *Spitfire Fond* suatu *fonds* untuk pembelian pesawat terbang *Spitfire*.²³

Terdapat dua *fonds* yang ada di Yogyakarta, yaitu *Prins Berhardfonds* dan *Spitfire Fonds*. Penggalangan dan sendiri dilakukan oleh Kraton Yogyakarta sebagai pemegang pemerintahan. Penanggung jawab dari penggalangan dana ini adalah Bupati Patih Kepatihan, Kanjeng Raden Tumenggung Notonegoro. Menurut surat perintah yang dikeluarkan bernomor Pr. 61998/311/12, bahwa seluruh abdi dalem diharapkan untuk menyumbangkan dana semampunya kepada dua komite *fonds* tersebut. Kedua *fonds* tersebut akan dijadikan satu sifatnya menurut pertimbangan dari komite-komite yang berwenang di Yogyakarta. Pengumpulan sumbangan dimulai pada akhir bulan Maret 1941 sebesar f 3,36. Pembayaran rutin setiap bulan kepada Bupati Patih Kepatihan.²⁴

Pangeran Haryo Hadipati Dhanurejo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan Yogyakarta juga memberi perintah antisipasi kepada seluruh Bupati yang ada di Yogyakarta bila musuh Jepang menyerang. Bahwa para bupati untuk menjadi pembantu di tiap-tiap kampungnya masing-masing. Serta pelarangan untuk memasuki kraton karena bahaya bom setiap saat dapat mengancam kraton.

Sri Sultan HB IX sendiri menanggapi keadaan perang ini pada tanggal 13 Desember, tanggapan Sri Sultan HB IX disampaikan melalui siaran Radio MAVRO. Sultan HB IX menghimbau kepada seluruh abdi dalem mulai dari golongan Pangreh Praja, sampai kepada lurah-lurah desa dan perangkatnya agar selama ada peperangan tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, selalu berhati-hati dan waspada.²⁵

²³ Onghokham., *op.cit*, hlm. 286

²⁴ Surat dari Bupati Patih Kepatihan kepada Kawedanan Kori, para abdi dalem tentang omite Prins Berhardfond dan Spitfirefonds merupakan pengumpul sumbangan untuk perang Inggris/ Nerland yang ada di Ngayogyakarta 21 Maret 1941. Arsip Kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

²⁵ Surat perintah Sultan no. 737 tanggal 13 Desember 1941 kepada Adipati Danurejo berkaitan dengan pidato Sultan di radio MAVRO pada hari Jumat agar diperintahkan kepada semua abdi dalem Pangreh Praja untuk melaksanakan kewajiban dan berhati-hati selama masa peperangan. Arsip kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

Tanggapan Sri Sultan HB IX kemudian diteruskan kepada Patih Danurejo, yang mengeluarkan surat berisi tindakan yang harus dilakukan selama perang. Surat ini ditujukan kepada 4 Bupati Pangreh Praja yang ada di Yogyakarta. Menyatakan bahwa seluruh pekerjaan di Nagari Ngayogyakarta harus tetap berjalan seperti biasanya. Abdi Dalem yang bertugas diperbolehkan menggunakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan menggunakan penjaga kota (sebagai pendamping) bila perlu.²⁶

Kebijakan mobilisasi juga diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda. namun jumlahnya sangat sedikit. Pasukan seluruhnya hanya berjumlah 30.000 dengan 6000 diantaranya adalah milisi. Kebanyakan orang-orang yang kena wajib militer adalah mereka yang ditunjuk oleh bupati dan seterusnya diambil di dalam pola pertahanan Legiun Mangkunegaran, Legiun Paku Alaman dan tentara-tentara Keraton Surakarta dan Yogyakarta.²⁷

Setelah peristiwa Pertempuran Laut Jawa, kapal-kapal pendarat Jepang sudah mulai mendekati Pulau Jawa, dan mulai malam tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa. Banyak berita-berita yang menggambarkan kekejaman pasukan Jepang. Semua menjadi takut apalagi banyak berita yang memuat bagaimana kejamnya pasukan Jepang di daratan Cina, Singapura, Manila dan lain-lainnya. Semua orang mengungsi ke daerah selatan yang dianggap masih aman, ke arah Solo dan Yogyakarta. Pada akhirnya kota Yogyakarta diduduki oleh Jepang pada 5 Maret 1942, 3 hari sebelum Pemerintah Hindia-Belanda menyerah di Kalijati.

3. Implementasi Kebijakan Kraton Yogyakarta Tahun 1943-1945

Hari-hari pertama pendudukan Jepang di kota Yogyakarta terjadi perampokan terhadap barang-barang milik Belanda dan orang asing di Kamar Bolah (di muka Seni Sono sekarang), dan toko-toko oleh orang Jawa. Pada hari berikutnya Sultan memerintahkan *Pepatih Dalem* K.P.H Danurejo VIII untuk mengumumkan *Wara-wara* yang isinya mengajak rakyat menjaga ketentraman dan menaati perintah, supaya tidak mendapat hukuman yang berat dan tidak mencemarkan nama baik *nagari* dan Sultan sendiri.

a. Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang di Yogyakarta

Sesuai dengan peraturan tentang Pelaksanaan Pemerintahan Militer tanggal 7 Maret 1942 pasal 2, maka pada tanggal 23 Maret 1942 Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta dirurunkan pangkatnya menjadi Residen Yogyakarta dan menjadi bawahan Gubernur

²⁶ Surat perintah Papatih Dalem Kraton Ngayogyakarta nomor. Pr 26524/311/12 tanggal 25 Desember 1941 tentang pelaksanaan tugas pemerintahan dalam masa perang. Arsip Kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

²⁷ Onghokham.,*op.cit*, hlm. 230.

Semarang. Sebagai Residen dia digunakan oleh Jepang untuk menjaga ketertiban sementara Jepang mengambil alih kekuasaan.²⁸

Mulai saat itu Jepang mengatur susunan pemerintahan Yogyakarta. Pemerintahan sipil yang sudah ada sejak zaman Belanda diteruskan oleh Jepang, hanya orang-orang dan nama instansinya diganti. Akan tetapi, pemegang pimpinan adalah militer Jepang baik di pusat maupun daerah.²⁹ Pemerintah Militer Jepang membentuk pula di setiap provinsi yang disebut *Gunseibu* dan ditetapkan dua daerah Istimewa atau *Koochi* yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Berbeda dengan pemerintahan Belanda, pemerintah Militer Jepang tidak mengadakan kontrak politik dengan Sultan Hamengkubuwono IX, tetapi diberi piagam yang mengandung perintah dan petunjuk untuk mengatur dan mengurus Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan *Koo* dianggap sebagai anggota keluarga dari raja Jepang. Untuk mengamati pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX, Jepang membentuk *Kooti zimu kyooku* atau Kantor Urusan Daerah Istimewa. Setelah menerima piagam pengangkatan kemudian Sultan HB IX menyatakan sumpah setianya kepada Jepang.

Ucapan sumpah setia Sultan HB IX tersebut merupakan strategi yang sangat jitu, yang akhirnya Pemerintah Militer Jepang memberi kelonggaran kepada Sultan untuk mengatur birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Setelah Sultan diangkat menjadi *Koo* oleh pemerintah militer Jepang dan diberi aturan serta petunjuk pelaksanaan yang jelas, maka Sultan mulai menentukan sikapnya secara tegas.

b. Propaganda Pemerintah Militer Jepang di Yogyakarta

Kedatangan Jepang ke Indonesia khususnya Yogyakarta, karena motif ekonomi, mencari keuntungan akan sumber daya alam untuk kepentingan perang. Setelah Sultan diangkat menjadi *Koo* oleh Jepang pada bulan Agustus 1942, propaganda Jepang dimulai. Pada saat pelantikan tersebut *Dai Nippon Gun Seireikan* menasehati bahwa tugasnya sekarang melenyapkan pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda yang mengungkgung bangsa Asia. Sultan diharuskan menaati perintah *Dai Nippon Gun Seireikan* dan memerintahkan rakyat Yogyakarta agar mereka mau bekerjasama dengan Jepang.

Demikianlah pentingnya propaganda ini bagi Jepang, sehingga dibentuk departemen tersendiri yaitu *Kikabuku Sendenbu*, atau kantor urusan Rancangan Propaganda.³⁰ Pemerintah Militer Jepang contohnya, melalui Kolonel Sato pembesar polisi Yogyakarta

²⁸ P. J. Suwarno (1994), *loc.cit.*

²⁹ Tasahadi. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek Infetarisasi dan dokumentasi Kebudayaan DIY. 1987, hlm. 14.

³⁰ Lihat. P.J. Suwarno (1994), *op.cit.*, hlm. 118.

mengajak B.P.H. Suryodiningrat mengunjungi konferensi pangreh praja di Bantul dan mengadakan propaganda bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa Asia, mereka di bawah pimpinan bangsa Jepang diajak melenyapkan bangsa kulit putih dari Asia.³¹

Menyangkut program dan proyek yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan pengerjaan pertahanan, Jepang membutuhkan tenaga rakyat terutama dari desa-desa. Di daerah-daerah dibentuk Panitia Penyerahan Romusa (PPR), yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusa berdasarkan laporan sementara atau data sementara.

c. Kebijakan Kraton Yogyakarta pada Masa Pemerintahan Militer Jepang

1). Sikap Kraton Yogyakarta terhadap Propaganda Pemerintah Militer Jepang

Segala kebijakan Kraton Yogyakarta di masa Jepang yang sukses, tidak lepas dari sosok Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX telah mengetahui bahwa pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah Kolonial Belanda yang tetap ingin menanamkan kekuasaannya. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Militer Jepang tidak membawa perubahan-perubahan yang berarti baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun di bidang struktural lainnya. Akan tetapi Sultan tetap menerima kekuasaan Jepang, semata-mata disebabkan karena Sultan merasa belum memiliki kekuatan untuk menolak kekuatan Jepang. Oleh karena itu Sultan harus memuruskan strategi perjuangan melalui manajemen politik secara terorganisir yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.³²

Sejak awal kedatangan Jepang ke Yogyakarta Sultan sudah menunjukkan sikapnya yang tegas terhadap Jepang. Sultan langsung memerintah Yogya, ketika tentara Jepang memasuki Yogyakarta pada 5 Maret 1942. Beliau mengatakan kepada tentara pendudukan itu agar segala sesuatu yang menyangkut daerah Kesultanan Yogyakarta dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan.³³

Pada awal tahun 1943 keadaan perang semakin berkobar terutama semakin memburuk bagi Jepang.³⁴ Maka pihak militer

³¹ P.J. Suwarno (1999), *op.cit.*, hlm. 2.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: CV. Eka Dharma. 1998, hlm. 20.

³³ Tim Penyusun. *Sejarah Perjuangan, Yogyakarta Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea. 1985, hlm. 20.

³⁴ Keadaan perang pada tahun 1943 semakin tidak menguntungkan Jepang, hal ini disebabkan oleh kekalahan Jepang atas Sekutu di laut Karang dan Guadalcanal pada

Jepang bersepakat untuk mengerahkan tenaga kerja (romusa), yang sangat dibutuhkan untuk mendukung militer dalam membangun prasarana pertahanan dan ekonomi untuk kebutuhan perang. Tempat pengerahan tenaga romusa dipusatkan di Jawa, karena Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi.

Pelaksanaan romusa tersebut diikuti pembentukan panitia romusa di daerah Yogyakarta. Sebagai langkah pertama, panitia memulai pendaftaran orang-orang yang sanggup dan cukup syaratnya untuk melakukan kewajiban sebagai pekerja. Pemerintah Militer Jepang kemudian membentuk organisasi Putera pada tanggal 9 Maret 1943. Di Yogyakarta Putera mengadakan kampanye menjadi romusa terhadap rakyat Yogyakarta pada 5 Juli 1943 di Alun-alun Utara yang dihadiri Soekarno.

Masalah romusa inilah kemudian dapat terlihat bagaimana cerdasnya strategi Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam menghadapi Jepang. Dengan siasat yang tepat Sultan Hamengkubuwono IX dapat mengelabui pihak Jepang. Apabila daerah lain mengalami penderitaan yang berat maka Yogyakarta boleh dikatakan sedikit beruntung. Mengelakkan permintaan Jepang tentu merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono IX ternyata cukup pintar untuk mengelabui Jepang. Pada tahun 1943 dibentuk suatu Badan Urusan Umum (*Soomubu*) yang dipimpin oleh K.R.T Honggowongso, yang tugasnya menolong pengangguran dan orang sengsara yang juga mengurus romusa.³⁵

Sri Sultan menyatakan politik Jepang tidak akan bisa dilaksanakan bila tidak dilakukan perbaikan. Jawatan kependudukan dan sumber daya alam di Kasultanan sengaja membuat daftar angka statistik direndahkan daripada yang sebenarnya. Pemerintah Jepang dibuat yakin, bahwa daerah Yogyakarta adalah daerah minus. Hasil buminya tidak mencukupi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Lagipula selalu diancam banjir pada musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, karena tiadanya sistem irigasi.³⁶

tanggal 7 Agustus 1942. Serangan Sekutu tidak dapat dibendung lagi oleh Jepang. Hal tersebut menyadarkan Jepang untuk mengikutsertakan rakyat di daerah jajahannya agar membantu Jepang dalam perang. Lihat O.D.P Sihombing. *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Jepang*. Jakarta: Sinar Jaya. 1962, hlm. 100.

³⁵ P. J. Suwarno (1999)., *op.cit*, hlm. 12-13.

³⁶ Sutrisno Kutoyo.,*op.cit*, hlm. 116.

Tanpa diduga Pemerintah Militer Jepang mendengarkan apa usulan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun sistem irigasi dan penanggulangan banjir. Kemudian di wilayah Kasultanan diadakan pembangunan saluran irigasi, pintu air, lengkap dengan bangunan pengontrol, bendungan, jembatan dan tanggul di daerah Adikarto.³⁷ Begitu juga dibuat saluran air yang melintasi kota Yogyakarta sepanjang lebih dari 30 kilometer, di sisi barat membentang hingga ke sungai Opak, sementara di sisi timur membentang hingga sungai progo. Sepanjang saluran tersebut, ribuan hektar areal pertanian menguntungkan hidupnya dari saluran ini.³⁸

Proyek pembuatan saluran air tersebut secara tidak langsung dikatakan kepada para pangreh praja bahwa proyek selokan itu untuk menghambat pengerahan orang-orang Yogyakarta yang diangkut oleh Jepang ke luar Yogyakarta sebagai romusa.³⁹ Apa yang dikatakan oleh Sri Sultan HB IX kepada para pangreh praja tersebut disampaikan kepada rakyat, sehingga rakyat lebih senang untuk bekerja di proyek tersebut.

Kepedulian Sri Sultan Yogyakarta terhadap rakyat Yogyakarta juga ditunjukkan pada masa Jepang ini. Dalam proyek pembuatan benteng pertahanan dari kawasan Bagelen hingga Kutoarjo, menyedot tenaga romusa yang sangat banyak. Sri sultan Hamengkubuwono IX datang ke pembangunan benteng tersebut. Selama berkunjung di pembangunan benteng tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta agar pemerintah militer Jepang memberi upah kepada para pekerja. Ternyata berkat usaha Sri Sultan dan pendekatan yang dilakukan para romusa yang bekerja kemudian mendapatkan upah. Kepala mandor upahnya Rp. 1,00 per hari, sedangkan pekerja mendapat 75 sen, walaupun ternyata dikenakan pajak sebesar 1 sen.⁴⁰

2). Perubahan Birokrasi di Kraton Yogyakarta

Upaya yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dalam menghadapi penjajah juga meliputi masalah pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menghadapi berbagai bentuk tindakan politik yang dilakukan oleh penjajah Jepang. Sultan bertekad

³⁷ *Ibid.*, hlm. 117.

³⁸ Miftahul Habib Fachrurozi. *Selokan Mataram Penyelamat Masyarakat Yogyakarta*. Yogyakarta. *Senandika*. 2017 .Vol. 1, hlm. 5.

³⁹ P. J. Suwarno (1999)., *op.cit*, hlm. 33.

⁴⁰ “Berkat Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX Romusa Pantai Selatan Digaji Jepang”, Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 5 september 1995, hlm. 1.

melepaskan Yogyakarta dari segala bentuk penjajahan melalui perubahan birokrasi pemerintahan. Sultan mempunyai kemampuan menyesuaikan perubahan yang dilakukan dengan situasi dan kondisi yang diciptakan Jepang.⁴¹

Perubahan selanjutnya yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX adalah menyangkut mengenai *Pepatih Dalem*. *Pepatih Dalem* dalam sejarahnya selalu menjadi kaki tangan penjajah sejak pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa. *Pepatih dalem* yang semestinya menjalankan perintah Sultan dalam tugasnya sehari-hari justru banyak berpihak kepada penjajah, dan memang hal tersebut dijelaskan disetiap kontrak politik yang ditandatangani Sultan dan Gubernur Belanda.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa selama masa pendudukan Pemerintah Militer Jepang di Yogyakarta, sikap Sultan HB IX selalu berusaha untuk lepas dari kontrol Pemerintah Militer Jepang dan melindungi rakyat dari eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Militer Jepang. Pemerintah Militer Jepang sering kali bersinggungan dengan Sultan, yang selalu mengajukan protes kepada Pemerintah Militer Jepang yang bertindak semena-mena.

Mengingat betapa pentingnya peranan *Pepatih Dalem*, yang dalam prakteknya sering lebih menentukan jalannya pemerintahan ketimbang Sri Sultan sendiri dan mengingat pengalaman-pengalaman sejarah yang tidak menyenangkan akibat kebijakan *Pepatih Dalem*, maka Sri Sultan kemudian sedikit-demi sedikit mengurangi peranan dan kekuasaan *Pepatih Dalem*. Hal ini dilakukan juga untuk mencegah jangan sampai *Pepatih Dalem* dimanfaatkan oleh Pemerintah Militer Jepang.⁴²

Kesimpulan

1. Yogyakarta adalah wilayah yang berbenuk Kasultanan, dengan Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Penduduk Yogyakarta adalah etnis Jawa yang tinggal di dalam benteng dan luar benteng tembok Kraton Yogyakarta. Pemerintahan Kraton dipegang oleh Sultan dengan *Pepatih Dalem* sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Kedudukan Kraton Yogyakarta dengan Pemerintah Hindia Belanda diikat dengan kontrak Politik.
2. Kraton Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1940-1942 juga turut merasakan kondisi kawasaan yang mulai tegang. Kraton Yogyakarta sebagai pemegang pemerintahan di Yogyakarta kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk antisipasi akan serangan Jepang. Selain untuk antisipasi Kraton Yogyakarta juga mengeluarkan

⁴¹ P. J. Suwarno (1994)., *op.cit*, hlm. 79.

⁴² Ir. Sujamto. *Op.cit*, hlm. 198.

beberapa kebijakan untuk membantu Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam menghadapi masuknya tentara Jepang.

3. Implementasi kebijakan yang dibuat Kraton Yogyakarta dalam menghadapi Jepang mengalami perubahan. Kraton Yogyakarta dibawah Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak serta merta melawan tentara Jepang yang masuk ke wilayah Yogyakarta. Dengan strategi yang cerdas dan matang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan perlawanan dengan berbagai kebijakannya. Berbagai propaganda dilakukan Jepang di Yogyakarta agar dapat menguasai sumber daya alam dan tenaga untuk kepentingan perangnya. Namun kemudian Sri Sultan dengan berbagai kebijakannya mampu menyelamatkan rakyat dan segala penindasan tentara Jepang. Birokrasi pemerintahan di Kraton pun kemudian dilakukan pembaharuan oleh Sri Sultan agar pemerintahan terhindar dari campur tangan Jepang. Terutama menyangkut masalah Papatih Dalem, karena menurut sejarahnya Papatih Dalem selalu digunakan oleh penjajah untuk kepentingannya.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Aiko Kurasawa. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa tahun 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- [2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: CV. Eka Dharma.
- [3] D. H. Burger. (1977) *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bharata.
- [4] Hermanu. (2012). *Ngayogyakarta*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta.
- [5] J.C. Bijkerk. (1988). *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter runtuhnya Hindia Belanda)*. Jakarta: Djambatan.
- [6] Ir. Soejamto. (1988). *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT.BINA AKSARA.
- [7] Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [8] Selo Soemardjan. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- [9] Soedarisman Poerwokoesoemo. (1984) *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [10]_____.(1985). *Kasultanan Yogyakarta Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik (1877-1940)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [11] Soedomo Bandjaransari. (1952) *Sedjarah Pemerintahan Kota Jogjakarta*. Jogjakarta: Djawatan Penerangan Kota Pradja Jogjakarta.
- [12] Soekanto. (1952) *Sekibar Jogjakarta 1755-1825*. Djakarta: Mahabarata.
- [13] Tasahadi. (1987) *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek Infetarisasi dan dokumentasi Kebudayaan DIY.

[14] Tim Penyusun. (1985) *Sejarah Perjuangan, Yogyakarta Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea.

Arsip

[15] Surat dari Bupati Patih Kepatihan epada Kawedanan Kori, para abdi dalem tentang omite Prins Berahardfond dan Spitfirefonds merupakan pengumpul sumbangan untuk perang Inggris/ Nerland yang ada di Ngayogyakarta 21 Maret 1941. Arsip Kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

[16] Surat perintah Sultan no. 737 tanggal 13 Desember 1941 kepada Adipati Danurejo berkaitan dengan pidato Sultan di radio MAVRO pada hari Jumat agar diperintahkan kepada semua abdi dalem Pangreh Praja untuk melaksanakan kewajiban dan berhati-hati selama masa peperangan. Arsip kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

[17] Surat perintah Papatih Dalem Kraton Ngayogyakarta nomor. Pr 26524/311/12 tanggal 25 Desember 1941 tentang pelaksanaan tugas pemerintahan dalam masa perang. Arsip Kraton Yogyakarta: KHP Widyo Budoyo.

Majalah

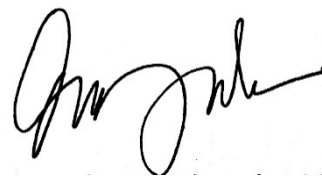
[18] “Berkat Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX Romusa Pantai Selatan Digaji Jepang”, Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 5 september 1995

[19] Miftahul Habib Fachrurozi. *Selokan Mataram Penyelamat Masyarakat Yogyakarta*. Yogyakarta. *Senandika*. 2017 .Vol. 1

Yogyakarta, 12 Juli 2017

Penguji Utama

Dosen Pembimbing



Dr. Aman, M.Pd
NIP. 19741015 200312 1 001

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19770618 200312 2 001

